

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA PALOPO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Narkotika Nasional Palopo pada tahun 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana kinerja Tahun 2023 ini. Semoga semua rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat bernilai ibadah, Amin.

Palopo, Januari 2023

Kepala BNN Kota Palopo



Ustin Pangarian, SE., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

- a. Data kasus tindak pidana narkoba yang ditangani di BNN Kota Palopo

URAIAN	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus tindak pidana narkoba	3	2	5	6
Jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba	7	10	10	9
Jumlah Barang Bukti Narkotika				
a. Shabu	21,35 gr	49 gr	173,93 gr	58,9343 gr
b. Ganja				
c. Heroin				
d. Narkotika lainnya				3,8929 Gram (tembakau gorila)

b. Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkotika di Sulawesi Selatan oleh POLDA Sulsel semua kabupaten/ kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat dilihat persebaran kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Makassar, kemudian Kab Gowa, Kab. Wajo, Kota Palopo, Kab. Sidrap, , Kab. Bulukumba, Kab. Takalar dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah .

Sumber : Polda Sulselbar 2020 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 DIREKTORAT RESERSE NARKOBA`

PERB DATA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
 DIT RESNARKOBA POLDA SULSEL DAN JAJARAN
 PERIODE 2018 S/D 2020

NO	Kesatuan	TAHUN					
		2018		2019		2020	
		LPR	SLS	LPR	SLS	LPR	SLS
1	Dit Narkoba	187	129	268	244	359	294
2	Restabes Mks	270	278	443	460	432	466
3	Res Pelabuhan	81	77	148	146	101	94
4	Res Gowa	86	91	177	199	182	224
5	Res Maros	36	27	70	56	60	57
6	Res Pares	31	27	35	23	48	36
7	Res Pangkep	19	6	45	40	43	29
8	Res Barru	26	20	36	34	35	37
9	Res Pinrang	69	86	78	66	79	63
10	Res Sidrap	64	77	104	126	89	83
11	Res Enrekang	8	5	14	13	19	14
12	Res Tator	12	9	16	23	10	12
13	Res Luwu	24	33	31	25	37	32
14	Res Palopo	37	35	62	44	72	60
15	Res Lutra	28	18	47	43	44	50
16	Res Lutim	23	14	29	29	37	25
17	Res Bone	41	45	53	62	48	54
18	Res Wajo	43	30	82	73	86	71
19	Res Soppeng	15	12	28	25	32	27
20	Res Sinjai	28	20	43	33	25	28
21	Res Selayar	12	10	14	11	8	8
22	Res B. Kumba	26	37	65	47	67	64
23	Res Bantaeng	9	14	18	24	34	24
24	Res Jeneponto	26	13	49	76	50	53
25	Res Takalar	21	16	41	42	79	78
26	Res Toraja Utara					13	12
Jumlah		1.217	1.103	1.996	1.994	2089	1995

Sedangkan untuk barang bukti sitaan narkotika di Sulawesi Selatan sangat bervariasi setiap tahunnya, pada tahun 2020 barang sitaan

terbanyak yaitu Daftar G (34.616 butir), Ekstasi (12.088), shabu (32.217,7398 Gram), dan ganja (1,014,4765 gram) Secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :

Barang Bukti Sitaan Narkotika oleh POLDA Sulselbar dan BNNP Sulsel Menurut Jenis Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Shabu	20,927 kg	15,375 kg	50,081 Kg	32.217 Gram	118,600 kg
2	Ekstacy	1.039 btr	181,5	3.307	12088 butir	16.615 btr
3	Putaw	nihil	nihil	Nihil	nihil	Nihil
4	Ganja	863,12	5,213 kg	12,039 Kg	1.014 Gram	17.252 kg
5	Daftar G	947.001	90.017	40.969	34.616 butir	1.112.603 Btr
6	Sintetis				310 gram	310 Gram

Sumber : POLDA dan BNNP

Situasi Tahanan Kasus Bandar/Pengedar dan Pengguna Narkotika Berdasarkan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan 2019-2020

No	Satker	2019		2020	
		Narkoba Bandar/Pengedar	Narkoba Pengguna	Narkoba Bandar/Pengedar	Narkoba Pengguna
1	LAPAS KELAS I MAKASSAR	66	53	8	23
2	LAPAS KELAS II A BULUKUMBA	625	1139	1079	1188
3	LMBG PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS	1206	3025	605	1689
4	LAPAS KELAS II A PALOPO	308	402	4210	381
5	LAPAS KELAS II A WATAMPONE	9661	1140	929	955
6	LAPAS KELAS II B TAKALAR	4350	28	5487	40
7	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A SUNGGUMINASA	4913	6351	2697	6620

8	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA	2496	53	2663	236
9	LAPAS KELAS II A PARE-PARE	3751	361	3818	884
10	RUTAN KELAS I MAKASSAR	8171	7464	7824	7837
11	RUTAN KELAS II B BANTAENG	570	209	461	322
12	RUTAN KELAS II B BARRU	1200	224	1153	93
12	RUTAN KELAS II B ENREKANG	188	964	120	698
14	RUTAN KELAS II B JENEPONTO	684	205	826	233
15	RUTAN KELAS II B MAKALE	53	0	92	32
16	RUTAN KELAS II B MALINO	72	214	8	286
17	RUTAN KELAS II B MASAMBA	946	716	1010	329
18	RUTAN KELAS II B PANGKAJENE	1015	1585	1373	1507
19	RUTAN KELAS II B PINRANG	3102	46	2729	94
20	RUTAN KELAS II B SELAYAR	282	80	230	33
21	RUTAN KELAS II B SENKANG	1814	399	2227	13
22	RUTAN KELAS II B SIDENRENG RAPANG	883	1706	1205	1724
23	RUTAN KELAS II B SINJAI	398	782	539	782
24	RUTAN KELAS II B WATANSOPPENG	686	138	999	99

Sumber : Kanwil Kumham 2020

c. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

FASILITAS LAYANAN REHAB	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	KET
Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	√		MEDIS
RSUD Sawerigading	√		MEDIS
Puskesmas Wara Utara Kota Palopo	√		MEDIS
Lembaga Rehab Hati	√		SOSIAL
RS Mujaisyah	√		MEDIS

d. Data fasilitas IPWL (kategori aktif atau tidak)

FASILITAS IPWL	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	KET
Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	√		AKTIF
RSUD Sawerigading	√		AKTIF

- e. Data penyalah guna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi.

LEMBAGA REHAB	2018	2019	2020	2021
Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo	25	25	25	34
RSUD Sawerigading	4			
Puskesmas Wara Utara Kota Palopo	2	5		
Lembaga Rehab Hati	24	10		
RS Mujaisyah	16	10		1

- f. Data dan informasi kondisi demografi kewilayahan, sekolah, perguruan tinggi

1) Demografi Wilayah

Luas Wilayah : 247,52 km² atau sama dengan 0,39 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Batas Wilayah:

Utara : Kabupaten Luwu (kec. Walmas)

Selatan : Kabupaten Luwu (Kec. Bua)

Barat : Kabupaten Tana Toraja

Timur : Teluk Bone

Secara Administratif terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan, dengan jumlah penduduk, 176.907 Jiwa

2) Jumlah Sekolah (SD, SLTP, SLTA), Guru, Murid/ Siswa

NO	TINGKAT SEKOLAH	JML SEKOLAH	SISWA/MAHASISWA
1	SD	80	18.719
2	SLTP UMUM / MTS	30	10.137
3	SMU/SMK/MA	31	11.785
4	PERGURUAN TINGGI	14	18.513
	TOTAL	155	59.154

g. Data SDM BNN Kota Palopo.

Jumlah Tenaga yang Dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Strata Dua	1	Orang
2	Strata Satu	15	Orang
2	Diploma III	2	Orang
3	SLTA	1	Orang
	Jumlah	19	Orang

Jumlah Tenaga yang Dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Berdasarkan subbag/seksi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Kepala	1	
2	Eselon IV	1	
3	Jab. Fungsional / pelaksana pada Subbag Umum	6	
4	Jab. Fungsional/pelaksana pada bagian P2M	3	
5	Jab. Fungsional/pelaksana pada bagian Rehabilitasi	2	
6	Jab. Fungsional /pelaksana pada bagian Pemberantasan	6	
	Jumlah	19	

Jumlah Kebutuhan Tenaga Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

NO	URAIAN	STANDAR BNN	SDM YANG DIMILIKI	KEBUTUHAN
1	KEPALA	1	1	0
2	ESELON IV	1	1	0
3	FUNGSIONAL SUBBAG UMUM	17	6	11
4	FUNGSIONAL SEKSI P2M	17	3	14
5	FUNGSIONAL SEKSI REHABILITASI	20	2	18
6	FUNGSIONAL SEKSI PEMBERANTASAN	21	6	15
	JUMLAH	78	19	59

Daftar Aset Barang Milik Negara pada Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

NO	URAIAN	KEADAAN 2021	KET
1	Peralatan dan Mesin	295 unit	
2	Gedung dan Bangunan	1 unit	Luas bangunan utama : 16,40 m x 14,40 m Luas tanah: 40 m x 50 m = 2.000 m ² Luas pekarangan: 1.763,84 m ²
3	Jaringan Telepon	3 unit	

h. Sarana klinik BNN Kota Palopo

BNN Kota Palopo memiliki Klinik Pratama Wijaya Sakti, yang telah didukung ruang klinik, fasilitas klinik, Dokter dan tenaga

perawat. Sampai sekarang BNN Kota Palopo belum memiliki gedung khusus untuk layanan klinik.

i. Senjata api

BNN Kota Palopo memiliki 4 unit senjata api, 3 unit laras pendek dan 1 unit laras panjang.

j. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Kota Palopo, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Kota Palopo yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

a. Gedung bangunan Kantor Milik BNN Kota Palopo

b. Tanah / Lahan Bangunan Kantor sudah milik BNN Kota Palopo hibah dari Pemerintah Daerah Kota Palopo

c. Anggaran DIPA

d. Sarana Kendaraan Operasional, Peralatan, sarana dan prasarana dukungan kantor

e. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo

f. Adanya beberapa OPD, Lembaga swasta, pendidikan dan masyarakat yang telah menyusun MoU P4GN dengan BNN Kota Palopo

k. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Palopo, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Palopo adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Keterbatasan SDM, yang saat ini SDM berjumlah 19 orang dari total kebutuhan sesuai DSP sebanyak 78 orang.

- b. Keterbatasan Sarana, antara lain Gedung dan sarana prasarana Klinik yang sesuai standar, Ruang Tahanan, dan sarana lainnya untuk mendukung program P4GN
- c. Keterbatasan alat intelijen dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba
- d. Jumlah SDM tidak sebanding dengan luas wilayah kerja khususnya pada bidang pemberantasan
- e. Kebijakan program P4GN di daerah baik berupa regulasi dan penganggaran kegiatan belum maksimal
- f. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti program rehabilitasi
- g. Kompetensi SDM

2. Evaluasi

a. Capaian kinerja periode 2021.

Pencapaian rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pada tahun 2021 dapat dilihat dari komponen kegiatan yang dianggarkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan meliputi input, output dan outcome. Berdasarkan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang

ditertibkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka skala pengukuran kinerja yang dipakai dalam laporan ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 85 - 100 = Sangat Baik
- 2) 70 - < 85 = Baik
- 3) 55 - < 70 = Cukup baik
- 4) < 55 = Kurang Baik

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Tahun 2022

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REAL
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	51,00	51,77
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika	78,67	92,23
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	indeks kemandirian partisipasi	3,20	3,24
4	Meningkatnya Akseibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	6
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Palopo	3,4	3,4
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3	3
7	Meningkatnya proses manajemen Kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	87,97
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Palopo	95	96,87

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BNN KOTA PALOPO

TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Palopo. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Palopo Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri anak dan Remaja	51,50	70.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Penyalahgunaan narkoba	79,00	100.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat	3,30	204.070
4.	Pasca rehabilitasi penyalahguna dan /atau pecandu narkotika	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan /atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	61%	11.495

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	12.450
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	112.049
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	48.010
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,5	
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3	150.000
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	37.265
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	92	1.256.637

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Palopo Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Palopo tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Palopo selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran BNN Kota Palopo, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

LAMPIRAN

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2
4.	Pasca rehabilitasi penyalahguna dan /atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan /atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan Rehabilitasi berkelanjutan	15
5.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	0
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas pelaksana intervensi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	10

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
	Pemerintah			
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	1
			Layanan rehabilitasi di Klinik BNNK	30
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	200
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit vertikal)	3
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	1
			Layanan Perkantoran	1

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Tahun 2023

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika Informasi dan edukasi melalui talkshow/ tatap muka Informasi dan edukasi Melalui Insert Konten Informasi dan edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang Informasi dan edukasi melalui Branding Sarana Publik Informasi dan edukasi melalui Placement Televisi Daerah dan Radio Lokal
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Koordinasi dalam rangka pelaksanaan

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				program ketahanan keluarga anti narkoba
				Intervensi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Rapat persiapan dalam rangka fasilitasi advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa
				Koordinasi dalam rangka advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa
				Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa
				Fasilitasi dan asistensi pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	<i>Rapat kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat</i> <i>Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba</i> <i>Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kota tanggap Ancaman Narkoba</i> <i>Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Instansi Pemerintah</i> <i>Workshop Penggiat P4GN Lingkungan Swasta</i> <i>Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urin</i> <i>Asistensi Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba</i> <i>Workshop Tematik P4GN</i> <i>Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap</i>

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				<i>Ancaman Narkoba pada sektor Kelembagaan</i>
				Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)		
5.	Pasca rehabilitasi penyalahguna dan /atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Pemantauan dan Pendampingan Klien Pascarehabilitasi

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat yang diberikan pelatihan	Bimbingan Teknis Petugas IBM
			Monitoring Rencana Aksi IBM	
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK 	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat
				Rapat koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
				Monitoring fasilitas rehabilitasi
			Layanan rehabilitasi di BNNK	Operasional Klinik / Fasilitas Rehabilitasi
				Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
				Pendampingan Pemulihan
		Layanan SKHPN		
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pembentukan unit IBM
				Asistensi dan supervisi IBM
				Operasional IBM
Layanan IBM				

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)		
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Penyelidikan Kasus Narkotika Penyidikan Kasus Narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)		
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan assesmen terpadu pelaku tindak pidana narkoba	Pelaksanaan Assesment terpadu
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba		

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)		
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi dan sinkronisasi data laporan RAN P4GN wilayah
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	Penyusunan Laporan keuangan unit Vertikal
			Layanan Perkantoran	Operasional Perkantoran
14.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah tangga dan Pengelolaan sarana dan		Layanan BMN	Pengelolaan BMN
			Layanan Umum	Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal
			Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
			Layanan prasarana Internal	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	prasarana		Layanan penyelenggaraan kearsipan	Pengelolaan arsip
15	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan		Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Publikasi informasi kelembagaan instansi vertikal BNN
16	Pengembangan Organisasi , tatalaksana, dan sumber daya manusia		Layanan manajemen SDM	Pembinaan Kepegawaian Pelayanan kesehatan pegawai